

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, maka setiap tahunnya perlu disusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi "Renja SKPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya".

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKP. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKP, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Oleh karena itu dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diperlukan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara sistematis, sinergis dan komprehensif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi pemerintah kota Bontang.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sesuai dengan Pasal 7 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja OPD Perubahan adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Rencana kerja OPD Perubahan memuat pendanaan dan prakiraan maju dengan memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Disahkannya Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Merupakan sebuah terobosan baru dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan lebih dalam mengusulkan aspirasinya. Serta proses pelaksanaan musrenbang yang tertata dan terstruktur, sehingga proses penyaringan aspirasi serta hasil skala prioritas usulan yang dibawa dalam musrenbang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

II. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2009 tentang organisasi Dinas daerah
16. Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
17. Peraturan Walikota Bontang No.39 tahun 2016 tentang Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk :

- Menjadi acuan dan dasar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam menyusun RKA 2023.
- Memberikan koridor perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada RKPD APBD Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2023 adalah untuk menciptakan sinergitas dalam proses perencanaan program/kegiatan, serta indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD, Renstra dan RPJMD. Serta mewujudkan perencanaan program/kegiatan yang dilaksanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang terstruktur, terintegrasi dan mendukung pencapaian visi/misi RPJMD dan OPD.

IV. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, Analisis kinerja pelayanan OPD, Isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPDP, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Restra SKPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Rancangan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Renja juga merupakan sebagai alat ukur untuk menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang selama Tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahap sebagai berikut :

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi Indikator Masukan (input), Keluaran (output), Hasil (outcome), Manfaat (benefit) dan Dampak (impact). Secara Umum Indikator yang sering digunakan untuk menilai Kinerja

Tahunan adalah input, output, dan outcome sementara benefit dan impact lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2. Capaian Analisis Kinerja

Capaian Kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang periode 2022-2026 diuraikan dibawah ini:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - A). **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - B). **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - C). **Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- D). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- E). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- F). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- A). Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota**
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota;

- b. Sub Kegiatan Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- e. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran;

B). Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;
- b. Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran;

C).Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat ;
- c. Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Sepanjang Tahun 2022 yang lalu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang telah berhasil melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Pencapaian program dan kegiatan (Prosentase Realisasi Anggaran Triwulan 1) tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0%

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7,63%
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0%

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor 0,0 %
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 73,96 %
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 26,00%
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 00,00%
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00%

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23,00%
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97,34%
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 18,46%

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16,00%
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8,00%
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 00,00%
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 00,00%

II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0%
2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 11,49 %
3. Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 00,00%

4. Pengadaan sarana dan prasarana, pencegahan, penanggulangan kebakaran alat Pelindung Diri 00,00%
5. Pembinaan aparatur Pemadam Kebakaran 00,00%

B. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

1. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0%
 2. Penilaian sarana dan prasarana proteksi Kebakaran 00,00%
- C. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran**
1. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi masyarakat 00,00%
 2. Pembentukan Pembinaan Relawan pemadam Kebakaran 00,00%

Pelaksanaan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2022 yang sudah disusun menetapkan 6 program dan 30 kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja Tahun 2022 secara umum dapat dicapai dengan **sangat baik**. Sampai akhir Desember 2022 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan sebesar 96,74 %.

2.1.3. Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bontang No.39 tahun 2016 tentang Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Berbagai indikator pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang telah diterapkan dalam renstra akan menjadi tolak ukur pencapaian fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Anggaran 2022 yang telah ditetapkan pada bulan Desember 2021 dan efektif berlaku Januari 2023 saat ini telah berjalan memasuki semester kedua.

Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, Sumber Daya Manusia dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progres pelaksanaan sampai berakhirnya Tahun Anggaran.

Lebih lengkapnya perkiraan pencapaian **kinerja** Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang pada Tahun 2022 sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Indikator Program	Kinerja	Target	Program/Kegiatan
1. Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran		100	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		100	2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %
		100	2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %
		100	2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 %
		100	2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
		100	2.08. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %
		100	2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %
2. Tercapainya Waktu Tanggap		100	04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non

		Kebakaran
	100	2.01.Pencegahan,Pengendalian, Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 %
	100	2.02.Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 100 %

Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target pencapaian yang ditetapkan, diharapkan sampai akhir pelaksanaan Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bontang dapat mencapai target kinerja sebesar 100% atau minimal sama dengan pencapaian Tahun 2021.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dan pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 Kota Bontang terdapat pada tabel 2.1.3 :

Tabel 2.1.3

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2021

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Akhir Periode Renstra OPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d Renja OPD 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s.d Tahun 2021		Tingkat C. Kinerja Anggaran R OPD s.d 2021 (%)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											

1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Tertibnya Pelaksanaan Pelayanan	100 %	16.330.714.8 37	12,6 4	15.625.889.0 49	100	14.619.268.5 99	12,6 4	1.538.784.06 1	12,6 4	1.634. 3
1.05.01.01	(1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai 3000	100 %	4.578.825	-	-	50 bua h	750.000	0,00	-	0,00	-
		jumlah materai 6000					100 bua h					
1.04.01.02	(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100 %	849.829.920	13,0 6	110.977.262	12 bln	139.200.000	13,0 6	110.977.262	13,0 6	110.97
1.04.01.06	(3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan	Jumlah perizinan kendaraan	100 %	124.544.040	89,1 1	110.977.262	19 unit	13.950.000	89,1 1	110.977.262	89,1 1	110.97
		Jumlah KIR	100				4					

	Dinas/Operasional	Kendaraan	%				unit					
1.04.01.08	(4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang sehat	100 %	579.984.500	6,54	37.950.000	1 org	14.400.000	6,54	37.950.000	6,54	37.950.000
1.04.01.10	(5) Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan alat Tulis Kantor selama setahun	100 %	582.387.773	12,31	71.719.450	12 bln	58.235.400	12,31	71.719.450	12,31	71.719.450
1.04.01.11	(6) Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak Dan Penggandaan	100 %	445.794.402	4,77	21.242.160	12 bln	55.170.000	4,77	21.242.160	4,77	21.242.160
1.04.01.13	(7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	100 %	1.526.275.000	8,02	122.331.000	21 jenis	200.000.000	8,02	122.331.000	8,02	122.331.000
1.05.04.01.16	(8) Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100 %	262.165.204	-	-	12 bln	41.420.000	0,00	-	0,00	-

1.04.01.17	(9) Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan tertentu	100 %	207.573.400	14,41	29.915.600	12 bln	25.974.000	14,41	29.915.600	14,41	29.915.600
1.04.01.18	(10) Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	100 %	2.863.926.830	13,73	393.356.769	12 bln	242.554.000	13,73	393.356.769	13,73	393.356.769
1.04.01.19	(11) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan tenaga teknis	100 %	4.730.732.098	15,56	735.979.520	42 org	1.072.100.000	15,56	735.979.520	15,56	735.979.520
1.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Berkondisi Baik	100 %	2.437.705.379	100	380.128.218	100	252.892.635	15,59	380.128.218	15,59	380.128.218

1.04.02.23	(1) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya sarana mobilitas berkondisi baik	100 %	1.706.314.399	20,77	354.328.918	100	219.842.635	20,77	354.328.918	20,77	354.328.918
1.04.02.27	(2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 %	236.755.778	10,90	25.799.300	100	33.050.000	10,90	25.799.300	10,90	25.799.300
1.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Kinerja Aparatur	100 %	8.440.709.792	9,24	780.011.955	100	202.005.000	9,24	780.011.955	9,24	780.011.955
1.04.03.02	(1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS dan Non PNS	100 %	1.099.955.867	10,33	113.635.000	-	-	10,33	113.635.000	10,33	113.635.000
1.04.03.08	(2) Peningkatan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur PNS	100 %	5.055.022.800	13,18	666.376.955	100	202.005.000	13,18	666.376.955	13,18	666.376.955

1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	686.890.906	1,66	11.370.000	100	37.360.000	1,66	11.370.000	1,66	11.370.000
1.04.05.01	(1) Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan formal	100 %	290.059.406	3,92	11.370.000	2 org	25.920.000	3,92	11.370.000	3,92	11.370.000
1.04.05.22	(2) Perayaan Hari Ulang Tahun SKPD	Terlaksananya HUT Damkar	100 %	396.831.500	-	-	500 ktk	11.440.000	0,00	-	0,00	-
1.04.10	PROGRAM PENYEBARLUAS AN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyebarluasan informasi pelayanan public	100 %	318.991.475	15,9 9	51.000.000	-	-	15,9 9	51.000.000	15,9 9	51.000.000
1.04.10.01	Pelaksanaan Pameran	Terpublikasinya informasi	100	305.255.000	16,6	50.930.000	-	-	16,6	50.930.000	16,6	50.930.000

	Pembangunan	pembangunan daerah	%		8				8			8	
1.04.20	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Tercapainya Waktu Tanggap Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %	58.850.851.149	2,48	1.456.761.900	80	1.178.776.045	2,48	1.456.761.900	2,48	1.456.000	
1.04.20.01	(1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya SDM yang Terampil	100 %	1.068.392.500	21,88	233.725.600	-	-	21,88	233.725.600	21,88	233.725.600	
1.04.20.02	(2) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan	100 %	915.765.000	4,84	44.345.700	100	40.000.000	4,84	44.345.700	4,84	44.345.700	

1.04.20.03	(3)Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai	100 %	51.587.400.00	0,92	473.319.100	-	-	0,92	473.319.100	0,92	473.31
1.04.20.04	(4) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	1.037.867.00	8,51	88.348.500	100	102.045.000	8,51	88.348.500	8,51	88.348
1.05.04.27.09	(5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	100 %	2.927.334.39	-	-	100	64.561.045	0,00	-	0,00	-
1.04.20.06	(6) Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK	Jumlah Bangunan Gedung yang diperiksa	100 %	398.327.250	4,66	18.568.000	-	-	4,66	18.568.000	4,66	18.568

1.04.20.07	(7) Pembinaan Kesiapsiagaan Linmas dalam Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya pembinaan perlindungan masyarakat	100 %	5.383.550.000	3,72	200.194.000	100	872.170.000	3,72	200.194.000	3,72	200.194.000
1.05.04.27.19	(8) Penyusunan Norma Stantar, Prosedur dan Manual Pencegahan Kebakaran	tersedianya SOP dan RISPK Penanggulang an dan Pencegahan Kebakaran	100 %	915.765.000	-	-	100	100.000.000	0,00	-	0,00	-
1.04.20.08	(9) Rehabilitasi Workshop Pemadam Kebakaran	Tersedianya workshop pemadam kebakaran yang refresentatif	0%	-	-	199.373.000	-	-	-	199.373.000	0,00	199.373.000
1.04.20.09	(11) Pengadaan Alat Penyelamatan	Tersedianya alat penyelamatan	0%	-	-	198.888.000	-	-	0,00	198.888.000	0,00	198.888.000

		yang memadai										
Rata-rata capaian kinerja(%)				82.912.940.6	5	4.218.056.13		3.534.787.08	5,09	4.218.056.13	5,09	4.218.0
				93		4		0		4		4
Predikat Kinerja												

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, memiliki tupoksi yang sangat komplit dan luas, dengan didukung aparatur sejumlah 205 (dua ratus lima) orang pegawai yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang PNS dan 166 (seratus enam puluh enam) orang tenaga Non PNS.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan kantor di Jl. Kapt.Piere Tendean No. 26 Kelurahan Bontang Kuala, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Dengan terbitnya Perwali NO.39 tahun 2016. Sehingga harus memiliki perencanaan yang matang dalam anggaran agar segala kegiatan dan tupoksi dalam berjalan dengan maksimal tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Standar tolak ukur pencapaian kinerja didasarkan pada lampiran I Permendagri 54 Tahun 2010 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2022-2026, standar tolak ukur tersebut juga telah disahkan dan tercantum dalam target RPJMD Pemerintah Kota Bontang 2022– 2026 .

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 39 Tahun 2016 :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan.

Fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat.
- b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat.
- g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

2. Sekretaris

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
- b. Pengkoordinasian, penyusunan, dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan perangkat daerah.
- c. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor.
- f. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan.
- g. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian.
- h. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor.
- i. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
- j. Pelaksanaan tugas lain-lain.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian

Fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

- c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
- d. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor.
- e. Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan.
- f. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan kantor.
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- h. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
- i. Pelaksanaan tugas lain-lain.

4. Kepala sub bagian perencanaan program dan keuangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan keuangan perencanaan dan keuangan.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
- b. Penyelenggaran urusan anggaran.
- c. Penyelenggaran dan pengkoordinasian urusan verifikasi dan pembendaharaan.
- d. Penyelenggaraan urusan akuntansi dan pelaporan.
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan.
- g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

Tugas Pokok :

Melaksanakan Urusan Kebakaran

Fungsi :

Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.

- a. Pengkoordinasian, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana.
- b. Pengkoordinasian, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pencegahan dan penyuluhan bahaya kebakaran.
- c. Pengkoordinasian, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengendalian bahaya kebakaran.

- d. Pengorganisasian dan pembinaan pada bawahan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain-lain.
6. Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian, dan Penyuluhan
- Tugas Pokok :
- Melaksanakan urusan pencegahan, pengendalian, dan penyuluhan
- Fungsi:
- a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
 - b. Penyelenggaraan urusan pencegahan dan penyuluhan bahaya kebakaran.
 - c. Penyelenggaraan urusan pengendalian bahaya kebakaran.
 - d. Pemantauan dan evaluasi pencegahan, pengendalian, dan penyuluhan.
 - e. Pengorganisasian dan pembinaan pada bawahan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain-lain.
7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
- Tugas Pokok :
- Melaksanakan urusan sarana dan prasarana
- Fungsi :
- a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan
 - b. Penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana
 - c. Pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana
 - d. Pengorganisasian dan pembinaan pada bawahan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain-lain.
8. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
- Tugas Pokok :
- Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- Fungsi :
- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
 - b. Pengkoordinasian, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional serta satuan linmas dan bina potensi masyarakat.
 - c. Pengorganisasian dan pembinaan pada bawahan
 - d. Pelaksanaan tugas lain-lain.

9. Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional

Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional.
- c. Pemantauan dan evaluasi urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional.
- d. Pengorganisasian dan pembinaan pada bawahan.
- e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

10. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat

Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitasi dan komunikasi pencerahan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka pembantuan tenaga penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
- b. Penyelenggaraan urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- c. Pemantauan dan evaluasi urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- d. Pengorganisasian dan pembinaan pada bawahan.
- e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BONTANG

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Setiap OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang yang membantu Walikota Bontang dalam Perencanaan dibidang Pencegahan, Pemadaman, Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bontang mengalami peningkatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Kota Bontang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat bidang yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan

proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Sehingga Usulan-usulan program masyarakat akan langsung diakomodir dan akan di usulkan di dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat kota yang akan melibatkan seluruh Stakeholder Pemerintahan dalam menentukan program-program prioritas pembangunan kedepannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang mulai berdiri sendiri pada tahun 2018 dimana sebelumnya merupakan bagian dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK. Maka sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Kota Bontang, sesuai dengan bidang tugasnya adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi sebagai Pencegahan, Pemadaman, Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat. Untuk itu, disusun Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2022 – 2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan RENJA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang untuk program dan kegiatan di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

2.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi daerah serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Karakteristik dari tujuan adalah sebagai berikut :

1. Idealis; berarti mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi berhasil
2. Jangkauan ke depan; yaitu dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan organisasi. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Abstrak; berarti tujuan belum dapat dikuantisir, melainkan menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang
4. Konsisten; tujuan harus konsisten sesuai dengan tupoksi organisasi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2022-2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang sebagai institusi perencana berkewajiban meningkatkan penerapan kaidah pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang indikator keberhasilannya ditandai dengan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terhadap sasaran RPJMD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang bertanggungjawab langsung terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban kinerja dimana indikatornya adalah penjabaran program RPJMD kedalam RKPD yang mutlak 100% setiap tahunnya, sehingga untuk mencapai beberapa target kinerja tersebut maka

tujuan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kerangka pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang.
2. Meningkatkan Fasilitas Sarana Prasarana Armada PMK guna mendukung Peningkatan Kinerja Aparatur dalam upaya Pelayanan Penanganan Kebakaran
3. Menentukan standarisasi Pelayanan untuk mendukung Kinerja Pelayanan Petugas melalui Penguasaan (SOP) Standar Operasi Prosedur
4. Meningkatkan Kewaspadaan, Partisipasi dan Kepedulian masyarakat dalam Penanggulangan Kebakaran
5. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.2. Sasaran

Tujuan yang diuraikan sebelumnya , secara terinci dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai dan program beserta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu:

1. Meningkatnya kinerja aparaturnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelayanan pencegahan, penanggulangan Kebakaran.
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik
3. Meningkatnya standarisasi Pelayanan Publik
4. Meningkatnya tingkat waktu tanggap penanganan bencana kebakaran
5. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan

Kriteria Sasaran dapat digambarkan dengan SMART – C sebagai berikut :

- o Spesific (spesifik), sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- o Measurable (dapat diukur), target sasaran dinyatakan dengan jelas & terukur.
- o Achievable (dapat dicapai), Target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, disusunnya program/kegiatan dalam renja ini, adalah demi pencapaian visi misi kepala daerah dan SKPD. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target renstra SKPD dan wujud nyata pengimplementasikan tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja Daerah yang tertuang didalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2022 – 2026, sama dengan target Indikator Kinerja Daerah yang menjadi pencapaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 – 2026. Penyusunan Renja Tahun 2022 masuk didalam tahapan penyusunan Rentra periode baru, dikarenakan terjadi pergantian kepala daerah hasil pemilihan langsung Kepala Daerah serentak pada tanggal Mei 2021.

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang tahun 2023 terdiri dari :

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- k. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis
- l. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional .
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor .

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan berupa:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan antara lain:
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Renja
 - e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
 - f. Review Renstra

Program Wajib

1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Program ini dimaksudkan guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai bahaya kebakar dan memberikan pengetahuan masyarakat mengenai penanganan kebakaran sejak dini sebelum kebakaran meluas.
- Untuk mengimplementasikan program tersebut di tempuh dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :
- a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemadam di Lingkungan Masyarakat
 - b. Penyusunan Norma, Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan
 - d. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- e. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran**
- f. **Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran**
- g. **Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK**
- h. **Peningkatan Layanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran**
- i. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran**

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. (lihat Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan tahun 2023 Kota Bontang.

PEMERINTAH KOTA BONTANG										
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022										
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
				URUSAN WAJIB						1.620.000,00
1				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1.620.000,00
1.0	0			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						1.620.000,00
1.0	0	0		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya urusan administrasi umum kepegawaian dan keuangan	100%	4.283.522.380, 00		100%	1.620.000,00
				Tingkat pelayanan	100%					

				administrasi perkantoran					
				Terlaksananya urusan adminstrasi umum kepegawaian dan keuangan	100 %				
				Terlaksananya urusan adminstrasi umum kepegawaian dan keuangan	100%				
				Terlaksananya urusan umum kepegawaian dan keuangan	100%				
				Terlaksananya urusan administrasi umum kepegawian dan keuangan	100%				
				Terlaksananya urusan adminstrasi umum kepegawaian dan keuangan	100%				
				Terlaksananya urusan adminstrasi	100 %				

					umum kepegawaian dan keuangan					
					Terlaksananya urusan administrasi umum kepegawaian dan keuangan	100 %				
					Terlaksananya urusan administrasi umum kepegawaian dan keuangan	100%				
1.0 5	0 3	0 1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 3000	50 Lembar	1.350.000,00		30 lembar	1.620.000,00
					materai 6000	200 Lembar			120 lembar	
1.0 5	0 3	0 1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Listrik, Internet, Air dan Jasa Televisi	12 bln	186.480.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg		0,00
1.0 5	0 3	0 1	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas operasional roda 10, roda 6, roda 4 dan roda 2	30 unit	33.200.000,00	Kas Umum Daerah Kota		0,00

					terbayar STNK			Btg			
1.0	0	0	08	Penyediaan Jasa	jumlah bahan dan	24 jenis	37.206.000,00	Kas			0,00
5	3	1		Kebersihan Kantor	alat kebersihan			Umum			
					tersedia			Daerah			
					jumlah petugas	1 org		Kota			
					kebersihan kator			Btg			
1.0	0	0	10	Penyediaan Alat Tulis	Jumlah Alat Tulis	82 jenis	87.625.500,00	Kas			0,00
5	3	1		Kantor	Kantor			Umum			
								Daerah			
								Kota			
								Btg			
1.0	0	0	11	Penyediaan Barang	Jumlah barang	10 Jenis	50.220.000,00	Kas			0,00
5	3	1		Cetakan dan	cetakan dan			Umum			
				Penggandaan	penggandaan			Daerah			
								Kota			
								Btg			
1.0	0	0	12	Penyediaan Komponen	Jumlah Pengadaan	17 jenis	50.245.000,00	Kas			0,00
5	3	1		Instalasi	Peralatan Listrik			Umum			
				Listrik/Penerangan	Jumlah Pengadaan	1 paket		Daerah			
				Bangunan Kantor	Pemeliharaan			Kota			
					Instalasi Listrik			Btg			
					Gedung Kantor						
1.0	0	0	13	Penyediaan Peralatan	Jumlah Pengadaan	12 unit	315.395.000,00	Kas			0,00

5	3	1		dan Perlengkapan Kantor	Komputer, Laptop dan Printer			Umum Daerah Kota Btg			
					Jumlah Pengadaan Berangkas	1 unit					
					Jumlah Peralatan Kantor	6 Jenis					
					Jumlah Papan Tulis dan Papan Informasi	10 Buah					
					Jumlah Pengadaan AC 1/2 PK dan 1 PK	4 unit					
					Jumlah Pengadaan CCTV	1 Paket					
					Jumlah Pengadaan Meja, Kursi dan Lemari Arsip	41 unit					
1.0	0	0	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							0,00
1.0	0	0	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung	20 Kali	115.446.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
5	3	1		Jumlah barang sembako	9 Jenis						

1.0 5	0 3	0 1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Minuman Tamu dan Kegiatan	4 Jenis	68.040.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0 5	0 3	0 1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi /pihak terkait	96 Kali	664.386.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0 5	0 3	0 1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Non PNS	83 orang	2.673.928.880,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0 5	0 3	0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	1.101.529.975,00					0,00
				Terlaksananya Pemeliharaan sarana perkantoran dengan kondisi baik	100%						
				Terlaksananya pemeliharaan	100%						

					sarana dan prasarana kantor						
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Berkondisi Baik	100%					
1.0	0	0	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Sepeda Motor Roda 2	2 unit	51.040.000,00				0,00
1.0	0	0	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Terpelihara	1 unit	66.020.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
					Jumlah Pemeliharaan Air Gedung Kantor	1 paket					
1.0	0	0	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	38 unit	858.191.575,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0	0	0	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan yang Dipelihara	69 unit	126.278.400,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0	0	0		PROGRAM	Meningktnya disiplin	100%	297.107.000,00				0,00

5	3	3		PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	aparatur						
1.0	0	0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian harian lapangan (PDL) PNS/Non PNS Pemadam Kebakaran	121 Stel	297.107.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas aparatur yang memahami tugas dengan baik	70%	119.252.600,00				0,00
5	3	5			Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang memahami Tugasnya dengan baik	100%					
1.0	0	0	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan	10 org	50.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0	0	0	22	Perayaan Hari Ulang Tahun SKPD	Jumlah hari Ulang Tahun dilaksanakan dan di hadiri	1 Kali	69.252.600,00				0,00

1.0 5	0 3	0 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksannya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	2.850.000,00					0,00
				Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%						
				Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%						
				TERlaksananya laporan keuangan SKPD	100%						
				Meningkatnya sistem Pelaporan capaian kinerja dan	100%						

					realisasi keuangan					
					meningkatkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	100%				
1.0	0	0	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	375.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg		0,00
1.0	0	0	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	675.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg		0,00
1.0	0	0	03	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas keuangan SKPD	1 Dokumen	375.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg		0,00
1.0	0	0	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	750.000,00	Kas Umum Daerah		0,00

								Kota Btg			
1.0 5	0 3	0 6	10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Renja 2019	9 buku	675.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0 5	0 3	0 6	30	Review Renstra SKPD	jumlah dokumen review Restra	5 buku	0,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0 5	0 3	1 0		PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pembangunan sektor penggulangan kebakaran	100%	30.000.000,00				0,00
1.0 5	0 3	1 0	01	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Jumlah Keikutsertaan pameran pembangunan /carnival	1 kali	30.000.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00

1.0 5	0 3	1 8	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Tercapainya pengendalian bahaya kebakaran dari aktivitas bangunan gedung	100%	2.367.887.824, 00				0,00
				Tercapainya layanan informasi dan edukasi pemadam kebakaran	50%					
				Tercapainya waktu tanggap sesuai SPM	10%					
				Tercapainya waktu tanggap sesuai SPM	100%					
				Meningktnya waktu tanggap daerah WMK	100%					
				Terpenuhinya kualifikasi SDM mekanik, pemeriksa, dan pengawas saptas damkar	100 %					

					Tercapainya Waktu Tanggap sesuai SPM	100%					
1.0	0	1	02	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Kelurahan Yang Mengikuti Penyuluhan	10 Kelurahan	115.798.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
1.0	0	1	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pengadaan Peralatan Selam	9 Jenis	1.209.680.000,00	Kas Umum Daerah Kota Btg			0,00
				Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pemadam	3 Jenis						
				Jumlah Pengadaan Mesin Cuci APD Pemadam	1 unit						
				Jumlah Pengadaan Kasur	15 Unit						
				Jumlah Pengadaan kamera	2 unit						
				Jumlah Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4 set						
1.0	0	1	04	Kegiatan Pencegahan	Pelaksanaan	12 bulan			218.002.000,00	Kas	

5	3	8		dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	penanganan bahaya kebakaran			Umum Daerah			
					Jumlah Latihan Basah/Kering dan Gabungan	38 Kali		Kota Btg			
1.0	0	1	07	Inspeksi dan Penarikan Retribusi Bidang PMK	Jumlah bangunan gedung yang terdata dan di inspeksi	34 banguna n	95.355.000,00	Kas Umum Daerah			0,00
5	3	8			Jumlah Pengadaan Pakaian Petugas Inspeksi	15 Lembar		Kota Btg			
1.0	0	1	13	Peningkatan Layanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pelatihan Pasukan	42 Kali	219.662.500,00	Kas Umum Daerah			0,00
5	3	8						Kota Btg			
1.0	0	1	15	Penyusunan Norma, Standar Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Identifikasi Potensi dan Masalah Sistem Proteksi Bahaya Kebakaran Skala Lingkungan	3 Keluraha n	0,00	Kas Umum Daerah			0,00
5	3	8						Kota Btg			
1.0	0	1	21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya	Jumlah kendaraan sarana dan prasarana yang		0,00	Kas Umum Daerah			0,00
5	3	8									

				Kebakaran	dipelihara			Kota			
								Btg			
1.0	0	1	23	Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemadam di Lingkungan Masyarakat	'	0	0,00	Kas			0,00
5	3	8						Umum			
								Daerah			
								Kota			
								Btg			
1.0	0	1	24	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang mengikuti pelatihan	17 orang	102.000.000,00	Kas			0,00
5	3	8						Umum			
								Daerah			
								Kota			
								Btg			
1.0	0	1	25	Evakuasi dan Penyelamatan	Pelaksanaan penanganan evakuasi dan penyelamatan	12 bulan	407.390.324,00	Kas			0,00
5	3	8			Jumlah Bahan Peralatan Perlengkapan	60 Jenis		Umum			
					Jumlah Bahan Kimia	200 Botol		Daerah			
					Jumlah Kegiatan Peningkatan Keterampilan	3 Kegiatan		Kota			
								Btg			

				Jumlah Pengadaan Pakaian Rescue	49 buah						
				TOTAL						8.202.149.779, 00	1.620.000,00

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2023, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja 2023. Baik keterlibatan secara aktif ataupun dalam bentuk sumbang saran pemikiran yang bertujuan untuk menyempurnakan Renja 2023 ini.

Diharapkan dengan adanya Renja 2023 ini, dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan, serta acuan kerja bagi seluruh aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa datang, pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel, transparan dan suksesnya pencapaian visi misi Pemerintah Kota Bontang serta visi misi Pemerintah Kota Bontang.

Bontang, Desember 2022
Kepala Dinas,



Drs. Amiluddin, M.Si
NIP:196709271997101001